

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 12
TAHUN 2019 TENTANG KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2022-2023**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Fharhan Putra

No. BP 2010832028



PEMBIMBING :

1. Dr. Aidinil Zetra, MA

2. Andri Rusta, S. IP., M.PP

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

ABSTRAK

Keberhasilan Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Implementasi perda tentang KLA di Kota Padang berhasil meraih penghargaan predikat kategori utama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak tahun 2022-2023. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus instrumental, dan teknik pengumpulan data berupa data sekunder, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan yakni implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Adapun hasil penelitian ini ialah pertama, aspek standar dan tujuan kebijakan Kota Layak Anak berjalan sesuai dengan pemenuhan hak anak yang telah ditetapkan sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Kedua, aspek sumber daya telah dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah. Ketiga, komunikasi antar organisasi belum berjalan secara efektif, dikarenakan masih sulitnya Gugus Tugas KLA dalam mengkolektifkan data, serta komunikasi kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan masih minim dikarenakan lembaga-lembaga yang disediakan Pemerintah Kota untuk konseling dan edukasi pola asuh anak jarang dikunjungi oleh masyarakat. Keempat, disposisi pelaksana sangat baik terhadap kebijakan ini dikarenakan adanya satu pemahaman yang sama terhadap kebijakan ini. Kelima, karakteristik pelaksana, pemerintah kota berkomitmen tinggi dalam pemenuhan hak anak dengan menjadikan Kota Padang sebagai Kota Ramah Anak. Keenam, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kondisi sosial masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan dikarenakan maraknya kasus kekerasan pada anak disebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai pola asuh anak dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Kota Layak Anak, 5 Klaster Hak Anak

ABSTRACT

The success of the Padang City Government in implementing the Child Friendly City policy is an interesting thing to study. The implementation of the regional regulation on KLA in the City of Padang succeeded in winning the main category award. This research aims to describe the implementation of Padang City Regional Regulation Number 12 of 2019 concerning Child Friendly Cities for 2022-2023. The research was conducted using a qualitative approach through the instrumental case study method, and data collection techniques in the form of secondary data, interviews and documentation. The theory used is policy implementation according to Van Meter and Van Horn. The results of this research are first, the standard aspects and objectives of the Child Friendly City policy are in accordance with the fulfillment of children's rights which have been established in accordance with the Convention on the Rights of the Child. Second, the resource aspect has been utilized optimally by the Regional Government. Third, communication between organizations has not been effective, because the KLA Task Force still finds it difficult to collect data, and communication with the communities targeted by the policy is still minimal because the institutions provided by the City Government for counseling and education on parenting are rarely visited by the community. Fourth, the implementers' disposition towards this policy is very good because they have the same understanding of this policy. Fifth, implementing characteristics, the city government is highly committed to fulfilling children's rights by making Padang City a Child Friendly City. Sixth, social, economic and political conditions. The social condition of the community is one of the inhibiting factors in the policy implementation process due to the increasing number of cases of violence against children due to the community's ignorance regarding proper child rearing patterns.

Keywords: Implementation, Child Friendly City, 5 Child Rights Clusters